

Merekonstruksi Perjuangan Emansipasi:

TELAAH KEPEMIMPINAN RAJA-RAJA PEREMPUAN DI KERAJAAN BONE

BAHRI

Editor | Andi Dewi Riang Tati & Suriani Abbas



DIREKTORAT SEJARAH, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-undang

Milik Negara
Tidak Diperdagangkan

Kontributor : Andi Dewi Riang Tati, Bustan dan Amirullah
Penyunting Materi : Suriani Abbas, Amiruddin dan St. Junaeda
Penyunting Bahasa : Khaeruddin, Marwan
Penyelia Penerbitan :

750.014
BAS
K
Kotak Katalog dalam Terbitan (KDT)

Cetakan ke-1, 2018
Disusun dengan huruf Times New Roman, 12 pt.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas rampungnya buku produk penelitian pengembangan disertasi dengan judul *Merekonstruksi Perjuangan Emansipasi: Telaah Kepemimpinan Raja-Raja Perempuan di Kerajaan Bone* sebagai rangkaian penelitian bantuan penulisan Buku Sejarah yang dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018.

Buku ini adalah merupakan salah satu referensi sejarah lokal Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Bone. Buku ini terdiri dari 6 bab. Bab 1 pendahuluan, yang meliputi sub bab 1) latar belakang, 2) permasalahan, 3) tujuan dan manfaat penulisan, 4) tinjauan pustaka, 5) metode dan sistematika penulisan. Bab 2 membahas *Qua Vadis* Kepemimpinan Perempuan dengan sub bab; 1) Kepemimpinan Perempuan, 2) kekurangan dan kelebihan kepemimpinan perempuan, 3) perbedaan kepemimpinan laki-laki dan perempuan, 4) perempuan dalam konteks global. Bab 3 membahas tentang Kepemimpinan Dan Perempuan Bugis dengan sub bab: 1) tradisi perempuan Bugis, 2) perempuan dalam budaya Bugis, 3) sekilas tentang raja-raja perempuan di Kerajaan Bone. Bab 4 membahas tentang gambaran umum Kerajaan Bone dengan sub bab: 1) awal terbentuknya, 2) perkembangan kerajaan bone, 3) kerajaan bone dalam pusran penjajah. Bab 5 membahas tentang kepemimpinan raja-raja perempuan di Kerajaan Bone dengan sub bab; 1) Bone Pada Awal Kepemimpinan Raja Perempuan,

2) Kebijakan Raja Perempuan, 3) Keberhasilan Raja Perempuan.

Bab Penutup, yang terdiri dari; 1) kesimpulan, 2) saran

Ucapan terima kasih kepada promotor saya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan yang telah menyetujui usulan penelitian ini. Begitupula kepada berbagai pihak/instansi yang telah membantu penyediaan referensi dalam penyusunan produk buku ini, Perpustakaan Pendidikan Sejarah, Badan Arsip dan Perpustakaan Wilayah Sulawesi Selatan dan berbagai pihak lain. Semoga produk buku ini dapat bermanfaat untuk khalayak ramai.

Makassar, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tjauan Pustaka	10
E. Metode dan Sistematika Penulisan.....	23
BAB 2 QUA VADIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN	
A. Kepemimpinan Perempuan	35
B. Kekurangan dan kelebihan kepemimpinan perempuan	44
C. Perbedaan kepemimpinan laki-laki dan perempuan	48
D. Perempuan dalam konteks global.....	51
BAB 3 KEPEMIMPINAN DAN PEREMPUAN BUGIS.	
A. Tradisi perempuan Bugis.....	66
B. Perempuan dalam budaya Bugis.....	72
C. Sekilas tentang raja-raja perempuan di Kerajaan Bone.....	84
BAB 4 GAMBARAN UMUM KERAJAAN BONE	
A. Awal terbentuknya	90
B. Perkembangan Kerajaan Bone	94
C. Kerajaan Bone dalam pusran penjajah	99
BAB 5 KEPEMIMPINAN RAJA-RAJA PEREMPUAN DI KERAJAAN BONE	
A. Bone Pada Awal Kepemimpinan Raja Perempuan	108
B. Kebijakan Raja Perempuan.....	125
C. Keberhasilan Raja Perempuan	133
BAB 6 PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	184
B. Saran	185
DAFTAR PUSTAKA	187
GLOSARIUM	193
IDEKS	196

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Sulawesi Selatan telah banyak berdiri kerajaan-kerajaan lokal sejak abad ke XIII, bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa sejak abad ke X sudah berdiri Kerajaan Siang yang dianggap sebagai kerajaan tertua di wilayah tersebut. Periode kepemimpinan masing-masing raja memiliki kekhasan tersendiri. Beberapa kerajaan lokal ini tumbuh dan berkembang menurut keadaan masing-masing dengan berbagai bentuk, dan corak kehidupan sosialnya. Demikian halnya di Kerajaan Bone telah tumbuh dan berkembang sebagai kerajaan besar berkat adanya sistem kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang raja.

Pada dasarnya kepemimpinan di Kerajaan Bone dapat ditelusuri dari sumber-sumber naskah tertulis berupa *lontarak*¹. Salah satu konsep kepemimpinan dalam *lontarak* yang diungkapkan oleh pemikir cendekiawan Arung Bila dan Kajao Laliddong bahwa ada empat macam permata bercahaya (sifat) yang harus dimiliki seorang pemimpin, yakni: *lempu'e nasibawangi tau'*, *ada tongengnge nasibawangi tike'*, *siri'e nasibawangi getteng*, *akkalengngge nasibawangi nyamekkininnawa*, *awaraningeng nasibawai*

¹ *Lontarak*, selain berarti tulisan, juga berarti kitab (pustaka), manuskrip yang terdapat di Sulawesi Selatan. Kata *lontarak* berasal dari kata *lontar*, semacam pohon yang banyak tumbuh di Sulawesi Selatan. Daun lontar dijadikan tempat menulis riwayat-riwayat, catatan-catatan, kejadian-kejadian, silsilah-silsilah, petuah-petuah.

cirinna. Artinya; Kejujuran disertai takut/taqwa, perkataan yang benar disertai waspada, *siri*²/harga diri yang disertai dengan ketegasan, kecerdasan yang disertai dengan hati, keberanian yang disertai dengan kasih-sayang (Hamid, 2001: 41). Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa seseorang yang diangkat menjadi pemimpin/penguasa harus menegakkan kejujuran (*lempu'*), menjaga harkat dan martabat (*siri'*) pada masyarakat atau rakyatnya, memiliki kecerdasan (*acca'*) dalam mengatur sistem pemerintahan dan harus berani (*warani'*) menegakkan keadilan dengan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya (tidak pandang bulu).

Sebelum Kerajaan Bone terbentuk, kerajaan ini terdiri atas beberapa kelompok *anang* (kaum) yang diikat oleh rasa seketurunan dari seorang nenek moyang tertua dalam sistem kepemimpinan patrimornial. Jumlah kelompok *anang* tersebut ada sebanyak tujuh kelompok atau *wanua*. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya hidup terpisah. Mereka menjalankan roda pemerintahannya secara otonom. Dalam perkembangan kemudian, dalam usaha untuk mengembangkan wilayah maupun mempertahankan kerajaan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain sering muncul peperangan. Kelompok yang kuat mengalahkan kelompok yang lemah. Setiap kaum bebas menyerang dan

² Menurut Erington, antropolog Amerika yang pernah mengadakan penelitian di Luwu 1975-1976 mengatakan bahwa tidak ada moral yang lebih penting buat orang Sulawesi Selatan daripada mempunyai *sirik* sehingga seseorang yang kurang *sirik* dianggap kurang kemanusiaanya.

diserang, tidak ada kelaliman karena belum ada *panggadereng* yang menentukan batas adil atau tidak adil, batas baik atau buruk (Mattulada, 1985:416).

Periode kekacauan yang terjadi di Tanah Bone ini dapat terselesaikan berkat kedatangan seorang *tomanurung*. Kedatangan *tomanurung*³ ini dinantikan oleh rakyat yang menginginkan kedamaian. Dalam *lontarak* diceritakan bahwa suasana Tanah Bone sebelum kedatangan *tomanurung* gelap gulita karena alam yang sangat tidak bersahabat, hujan dan petir, gempa selama tujuh hari. Setelah peristiwa alam ini berhenti, terlihat seorang laki-laki berdiri di tengah padang dengan berpakaian putih. Orang tersebut dianggap sebagai orang yang turun dari kayangan, segenap rakyat berkumpul dan meminta orang tersebut menjadi raja.

Setelah terjadi kesepakatan antara *tomanurung* dengan ketua *anang*. Ketujuh *wanua* yang dipimpin oleh seorang *matowa* menjalin satu kesatuan yang disebut dengan *matowa pitue*. Ketujuh *wanua* tersebut disatukan menjadi Kerajaan Bone. Didirikan istana sebagai ibukota yang disebut *kawerang tana Bone* (ikatan tanah Bone). Dalam perkembangan berikutnya *kawerang tanah Bone* berkembang menjadi *Watampone* yang berarti pusat Bone (Rahim, 1992:63).

³ Tomanurung berarti manusia yang berasal dari langit, dalam silsilah kerajaan kerajaan di Sulawesi Selatan tomanurung adalah raja pertama di kerajaan-kerajaan tersebut, kecuali Kerajaan Wajo.

Para *matowa* yang terdiri sebanyak tujuh orang membentuk suatu badan musyawarah disebut dengan *matowa pitue*. Ketujuh *matowa* ini selain bertindak sebagai anggota dewan pemerintahan, juga menjalankan pemerintahan atas *wanua* asalnya secara otonom. Setelah itu di Kerajaan Bone terjadi intensifikasi pemusatan kekuasaan dalam satu bentuk Negara Kesatuan Tanah Bone. *Dewan matowa pitue* kemudian dirubah menjadi *ade pitue*. Dewan ini bertindak sebagai Dewan Menteri Kerajaan Bone yang menjalankan kekuasaan eksekutif sebagai penyambung lidah rakyat terhadap raja (Mattulada 1985:409).

Di Kerajaan Bone kedudukan raja tidak hanya diperuntukkan khusus kepada seorang laki-laki, tetapi terbuka untuk perempuan. Penunjukkan seseorang yang akan menduduki tahta kerajaan diperuntukkan bagi yang memiliki darah *tomanurung*. Dalam sejarahnya Kerajaan Bone pernah dikendalikan oleh enam raja perempuan yaitu We Banrigau Makkalempie Mallajange' ri Cina Raja Bone IV (1470-1510), We Tenrituppu Raja Bone X (1596-1605), Batari Toja Daeng Talaga Raja Bone XVII (1714-1715), kemudian terpilih lagi sebagai Raja Bone XX (1723-1748), We Maniratu Arung Data Raja Bone XXV (1823-1835), Pancaittana Besse Kajuara Raja Bone XXVIII (1857-1860), dan Fatimah Banri Raja Bone XXX (1871-1895) (Palloge, 2006:18-21).

Perempuan yang menjadi penguasa kerajaan bukan hal yang baru dalam sejarah Bugis. Posisi perempuan "istimewa"

bagi kaum lelaki dalam semua urusan pemerintahan, dan kerap kali diangkat menjadi raja. Pada acara kerajaan, perempuan juga hadir di tengah kaum pria, duduk dalam sidang yang membahas masalah-masalah kenegaraan, berhak memberikan pertimbangan. Semua jabatan kerajaan, bahkan termasuk *arung matowa*, terbuka bagi perempuan, dan benar-benar memiliki posisi penting dalam pemerintahan (Pelras, 2006:189).

Masyarakat Bugis memiliki perspektif sendiri yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki, tergambarkan dari relevansi teks (mitologi Bugis), *lontarak*, dan *pappaseng*. Pada *pappaseng*, masyarakat Bugis menggambarkan muatan filosofis yang dianut secara prinsip. Baik secara tekstual maupun kontekstual, muatan tersebut dipatuhi dalam bentuk manifestasi dalam realitas sosial dan dianggap sebagai sesuatu yang dijiwai oleh prinsip *siri'-pässe*. Salah satu *pappaseng ugi* dituliskan mengenai karakteristik perempuan, yakni: *Eppa 'i sipa'na makkunraie* (empat watak perempuan): *massipa arunggi* (berwatak seperti raja), *massipa' tau sugi* (berwatak seperti orang kaya), *massipa' anana'i* (berwatak seperti anak kecil), dan *massipa' asui* (berwatak seperti anjing) (Mattaliti, 1986:100). Berdasarkan uraian dalam *pappaseng* tersebut tergambarkan bahwa perempuan memiliki sifat yang harus dipatuhi dan dihargai dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang memiliki posisi yang sama dengan laki-laki, tidak menempatkan perempuan sebagai nomor dua dari laki-laki.

Pada persoalan yang sifatnya universal, perempuan dapat dilibatkan karena perempuan memiliki wilayah privasi yang hanya boleh dimiliki sendiri dan tak dapat dicampuri oleh orang lain.

Kepemimpinan perempuan di Kerajaan Bone ini sangat berperan bagi keberadaan Kerajaan Bone, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam eksistensi kerajaan. Melalui kebijakan dan keberhasilan yang diraih sehingga Kerajaan Bone pernah dipimpin 6 raja perempuan. Kebijakan diterapkan mengalami keberhasilan dan berpengaruh. Kepemimpinannya memiliki potensi dan kompetensi yang tidak diragukan. Nilai ketegasan dan keberanian melakukan perubahan serta ketulusan sikap, kesabaran dan kematangan emosional memberikan semangat dan keteguhan dalam memimpin rakyat, adalah bukti kongkrit sebuah perjuangan yang patut diteladani. Raja-raja perempuan telah menunjukkan sikap dan tindakan sudah sangat tepat sesuai zamannya, telah merekonstruksi pandangan bahwa perempuan acapkali diasumsikan sebagai makhluk lemah, sesungguhnya memiliki keteguhan hati dan komitmen tinggi dalam menorehkan tinta emas bagi sejarah kerajaan yang dipimpin.

Seiring dengan majunya perkembangan zaman pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kepemimpinan perempuan masih dipermasalahkan oleh sebagian orang. Kita seakan lupa bahwa dibalik dominasi laki-laki dalam sejarah, ternyata ada sejumlah perempuan hebat yang menjadi

penguasa. Munculnya beberapa pemimpin dari kaum perempuan tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga mampu menjadi pemimpin masyarakat jika diberi kesempatan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas ada beberapa alasan yang membuat penulis untuk tertarik mengkaji tentang kepemimpinan perempuan di Kerajaan Bone. Dalam sejarah Sulawesi Selatan ada beberapa kerajaan besar yang pernah berkuasa seperti Kerajaan Gowa, Kerajaan Luwu dan Kerajaan Soppeng masing-masing kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja. Jika kita membaca berbagai literatur tentang kerajaan tersebut maka akan menemukan bahwa raja-raja yang memimpin kerajaan banyak didominasi oleh laki-laki dan hanya sedikit dipimpin oleh kaum perempuan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa kepemimpinan perempuan di Kerajaan Bone sangat menarik untuk dikaji karena dewasa ini perempuan semakin menunjukkan adanya perubahan yang berimplikasi mendorong kemajuan peran perempuan disemua bidang. Perempuan saat ini, sudah lebih terbuka menafsirkan nilai-nilai kultur, secara kuantitas dan kualitas tidak hanya terlibat di ranah domestik (keluarga/rumah tangga), tapi juga aktif di ranah publik. Bahkan banyak melakukan aktivitas ganda di lingkungan rumah, sehingga status sebagai istri, ibu rumah tangga, teman bagi anak, maupun unsur anggota masyarakat dapat dilakoninya dengan baik.

Masih kurangnya penulisan tentang sejarah perempuan membuat penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam. Rekonstruksi sejarah kita bercorak androsentris, berpusat pada kegiatan kaum laki-laki. Hal ini pun kemudian oleh Ann D. Gordon dkk (1988:91) dalam artikelnya yang berjudul "*The Problem of Women's History*", dikatakan bahwa sejarawan mengabaikan kaum perempuan karena dalam pikiran mereka yang signifikan adalah yang nyata di bidang politik dan ekonomi adalah laki-laki. Laki-laki aktif dan wanita pasif; kehidupan wanita dianggap *timelessness* tidak dibatasi oleh waktu, berpusat pada mengandung dan memelihara anak dalam lingkungan keluarga.

B. Permasalahan

1. Mengapa perempuan dapat menjadi seorang raja di Kerajaan Bone?
2. Bagaimana situasi Kerajaan Bone pada awal kepemimpinan raja perempuan?
3. Bagaimana kebijakan dan usaha yang ditempuh oleh raja-raja perempuan dalam memimpin Kerajaan Bone?
4. Bagaimana keberhasilan yang dicapai oleh raja-raja perempuan di Kerajaan Bone?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan perempuan dapat menjadi raja di Kerajaan Bone.

2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang situasi Kerajaan Bone pada awal kepemimpinan raja perempuan.
3. Untuk menganalisis kebijakan dan usaha yang ditempuh oleh raja-raja perempuan dalam memimpin Kerajaan Bone.
4. Untuk menganalisis keberhasilan yang dicapai oleh raja-raja perempuan di Kerajaan Bone.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terhadap Sejarah Sulawesi Selatan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, khususnya sejarah perempuan Sulawesi Selatan pada saat masih terdiri dari kerajaan-kerajaan.
2. Pengkajian dan pengungkapan masalah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peminat dan pemerhati sejarah serta sebagai kontribusi pemikiran dalam penelitian selanjutnya, khususnya dalam pengembangan sejarah lokal Sulawesi Selatan.
3. Memberikan pengetahuan yang lebih spesifik mengenai kepemimpinan perempuan di Kerajaan Bone
4. Untuk menambah khasana kurikulum sejarah Indonesia.
- 5.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kepemimpinan

Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar *pimpin (lead)* berarti bimbing atau tuntun, terdapat dua pihak yaitu yang dipimpin (rakyat) dan yang memimpin (imam). Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemimpin (*leader*) berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pimpinan artinya orang yang mengepalai. Apabila dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi kepemimpinan (*leadership*) berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok (Kencana, 2003).

Berdasar dari pengertian tersebut, pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dan hak untuk mempengaruhi orang lain, sehingga berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut melalui kepemimpinannya. Secara sederhana kepemimpinan adalah setiap usaha untuk mempengaruhi. Sementara itu kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin tersebut. Ini merupakan suatu sumber yang memungkinkan seorang pemimpin mendapatkan hak untuk mengajak atau mempengaruhi orang lain (Miftah, 2003).

Dalam perspektif ilmu-ilmu sosial, pemimpin dipahami sebagai seseorang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain, sehingga pemikiran, kata dan tindakannya diperhatikan oleh orang lain tersebut. Dengan demikian, pengaruh menjadi kunci kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sehingga dapat memutuskan, tentang apa yang harus dikerjakan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (Sani, 2005:36).

Setiap masyarakat membutuhkan para pemimpin yang dapat mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan bersama dan aktivitas untuk kepentingan umum. Dengan cara yang dapat diterima, para pemimpin dapat merumuskan masalah dan mengusahakan pemecahannya. Seseorang menjadi pemimpin karena ada kebutuhan masyarakat akan seorang yang dipilih, yang dianggap mampu mengadakan aktualisasi dan merealisasi dari kebutuhan yang dianggap sebagai keinginan masyarakat.

2. Tipe Kepemimpinan

a. Tipe Otokratis

Kepemimpinan secara otokratis adalah kepemimpinan yang cara memimpinya menganggap organisasi sebagai miliknya sendiri. Sehingga seorang pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap para anggota organisasinya dan menganggap sebagai bawahannya dan merupakan alat atau mesin, tidak diperlakukan sebagaimana manusia. Bawahan hanya menurut dan menjalankan perintah atasannya serta

tidak boleh membantah, karena pimpinan tidak mau menerima kritik, saran dan masukan.

Otoritarisme mempunyai ciri khas bahwa seorang pemimpin memegang kunci dalam pembuatan keputusan, dan pengikut hanya menerima saja tanpa bertanya. Sementara Purwanto (2006) menyebutkan ciri kepemimpinan otokrasi sebagai berikut:

1. Menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi.
2. Mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.
3. Menganggap bawahan sebagai alat.
4. Tidak mau menerima pendapat, saran, dan kritik dari anggotanya.
5. Terlalu bergantung pada kekuasaan formalnya.
6. Caranya mengerakkan bawahan dengan pendekatan paksaan dan bersifat mencari kesalahan.

Tipe kepemimpinan otokratis ini dapat kita jumpai dalam pemerintahan feodal oleh kerajaan-kerajaan pada zaman abad pertengahan. Kepemimpinan yang otokratis biasanya dikendalikan oleh seorang pemimpin yang mempunyai perasaan harga diri yang sangat tinggi. Bawahannya dianggap bodoh, tidak berpengalaman, dan selayaknya diperintah sesuka mereka. Dengan egoisme yang sangat tinggi, seorang pemimpin yang otokratik melihat peranannya sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan organisasional seperti kekuasaan yang tidak perlu dibagi

dengan orang lain dalam organisasi, ketergantungan total para anggota organisasi mengenai nasib masing-masing dan sebagainya.

b. Tipe Paternalistik

Cara ini dapat dikatakan untuk seorang pemimpin yang bersifat kebapaan, ia menganggap bawahannya bagaikan anak yang belum dewasa. Tipe pemimpin yang paternalistik banyak terdapat di lingkungan masyarakat yang masih bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Dengan demikian pemimpin semacam ini jarang sekali atau tidak pernah memberikan kepada bawahannya untuk bertindak sendiri, untuk mengambil inisiatif dan mengambil keputusan. Para bawahannya tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasinya. Konsekuensi dari perilaku demikian ialah bahwa para bawahannya tidak dimanfaatkan sebagai sumber informasi, ide, dan saran. Seorang pemimpin yang paternalistik ini dalam hal-hal yang tertentu sangat dibutuhkan, akan tetapi sebagai pemimpin pada umumnya kurang efektif.

c. Tipe Kharismatik

Tipe kepemimpinan kharismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan tingkah laku orang lain, sehingga dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpin bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. Pemimpin dipandang istimewa karena sifat-sifat kepribadiannya yang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik & A. Surjomihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Abidin, A. Z. 1983. "Benih-Benih Pancasila yang Terpendam di Dalam Lontara Bugis: Suatu Percobaan Menggali Unsur-Unsur Pancasila dari Teks-Teks Kuno". *Jurnal Lontara*. Universitas Hasanuddin, Nomor 19 Tahun ke XXIII: 69--82.
- Abdurahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Abdullah, H. 1985. *Manusia Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Ali, Muh. 1967. *Bone Selayang Pandang*. Watampone: Yayasan Kebudayaan Kabupaten Bone.
- Patengai, Andi. Lontara, salinan No. 219, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Arham, Rahman, dkk. 2007. *Konsep Gender dalam Petuah Bugis*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Amin, Muhammad. 1993. *Bone Menentang Ekspedisi Belanda 1859*. Ujung Pandang: UNHAS.
- Asba, Rasyid. 2004. *Profil Perempuan Pejuang Sulawesi Selatan*. Makassar: La Macca Press.
- Bainar. 1998. *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemoderenan*. Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- Djibe, Harun Rasjid. 2007. *Besse Kajuara (Srikandi Tangguh dari Timur) Ratu Bone XXVIII*. Makassar: Media Fajar.

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2003. *Kerajaan Bone dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan Abad XIX*. Makassar.
- De Graaf, H.J. 1974. *Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa* (transl.) Jakarta: Grafitipers.
- Evans, Ricahard J. 1977. *The Feminists (transl)*. London: Croom Helm Ltd.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.
- Gardiner. Juliet. 1988. *What is History Today?* London: Macmillan Education.
- Hayati, Chusnul & Yulianti. 2000. *Peranan Ratu Kalinyamat Di Jepara pada Abad XVI*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Hasan. Barlianti. 2006. *Dinamika Eksistensi Perempuan: Tinjauan Historis dan Sosio Kultural Gerakan Perempuan di Sulawesi Selatan*. Makassar: toACCAe Publishing.
- Hamid, Abu dkk. 2007. *Sejarah Bone*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone.
- Hafid. Abdullah. 1998. *Dalam Laporan Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Ibrahim, Marwah Daud. 1991. *Perempuan Indonesia: Perempuan Masa Depan? Mengapa Tidak*. Dalam Tan, Melly G. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Idris, Rabihatun. 2007. *Keterlibatan Perempuan dalam Sejarah Sulawesi Selatan (Jurnal Attoriolong)*. Makassar: Jurusan Pendidikan Sejarah.

- _____. 1982. *Peranan Wanita di Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing*. Ujung Pandang.
- Ihham, Fahrin. <http://duniabaca.com>. *Hakekat dan Teori Kepemimpinan*. Diakses tanggal 26/1/2013.
- Ihromi, T.O. 1995. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kartono, Kartini. 1983. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali.
- Kartodirdjo, Sartono. 1986. *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Kartowijono, Sujantin. 1982. *Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Yayasan Indayu.
- Kencana, Inu. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah, edisi kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Lontara dalam Sejarah Politik Sulawesi Selatan, 2003:36.
- Lontara Kerajaan Bone No.1 tebal 266 halaman ukuran folio.
- Lontara Kerajaan Bone No.5 tebal 162 halaman ukuran folio.
- Mappangara, Suriadi. 2004. *Ensiklopedi Sejarah Sulawesi Selatan sampai Tahun 1905*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mattulada. 1985. *Latoa : Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Mujiono, Imam. 2002. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Yogyakarta: UII Press.

- Nawawi dan M. Martin, 1995. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Noerhadi, Toeti Herawaty. 1991. *Wanita dan Kepemimpinan*. Dalam Tan, Melly G. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugroho. Notosusanto. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Patunru. Daeng. Abdulrazzak. 1989. *Sejarah Bone*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Palloge, Andi. 1990. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone*. Sulawesi Selatan: Yayasan Al Muallim.
- Pelras. Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: NALAR.
- Rahim, A. Rahman. 1985. *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Rizal, Hannabi dkk. 2004. *Profil Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan jilid I*. Sungguminasa: Buana.
- _____. 2007. *Profil Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan jilid II*. Sungguminasa: Buana.
- Rasjid, Darwas. 1991. *Peristiwa Tahun-Tahun Bersejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Rady. Andi. 2007. *Riwayat To Bone*. Watampone
- Renier, GJ. 1997. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, Diterjemahkan oleh Umar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rottger. Birgitt. 2009. *Pembagian Tanggung Jawab Aspek-Aspek Jender dan Kewenangan dalam Masyarakat*

- Makassar. Dalam Roger, Tol. Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan. Makassar: Ininawa.
- Sani, Yamin. 2005. *Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan di Sulawesi Selatan*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Saud, Haji, Mashudy. 1975. *Perang Bone Tahun 1905 dan Proses Kemunduran Kerajaan Bone*. Ujung Pandang: IKIP
- Sessu. Amir. 1994. *Relung-Relung Sejarah Tana Bone (jilid II)*. Watampone: Damai.
- Sofyan, Ismail. 1994. *Wanita Utama Nusantara ; dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Jayakarta Agung.
- Syarifuddin, Amir. 1982. *Struktur dan Sistem Pemerintahan Kerajaan di Sulawesi Selatan abad XV-XVIII*. Studi Sejarah Hukum Tata Negara Adat Berdasarkan Lontarak. Ujung Pandang. Unuversitas Hasanuddin.
- Soeroto. Sitisoeemandari. 1977. *Kartini Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sondang. P. Siagian. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyono, Capt. 2003. *Peperangan Kerajaan di Nusantara*. Jakarta: Grasindo .
- Suryochondro, Sukanti. 1984. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia*. Jakarta: C.C. Rajawali.
- Tilaar, Martha. 1991. *Citra Wanita Indonesia Tahun 2000: Kemandirian dalam Menjawab Tantangan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Tol, Roger. 2009. *Kuasa dan Usaha di Masyarakat Sulawesi Selatan*. Makassar: Ininawa.

Yusuf, Maftuchaf. 1991. *Kepempinan Perempuan: Pemikiran Seorang Muslimat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Yates, Gayle Graham. 1977. *What Women Want. The Ideas of the Movement (translet)*. London: Harvard University Press